



LKJ

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SUMBERSUKO
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUMBERSUKO**

KATA PENGANTAR


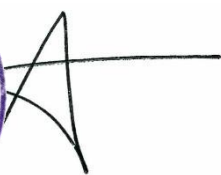
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Sumbersuko yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari hingga bulan Desember 2023. Laporan ini menjabarkan keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Sumbersuko Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Sumbersuko, 29 Desember 2023

 MAT SUMBERSUKO

ADNAN LEGUH PAMBUDI, S.STP

NIP. 19920131 201406 1 001



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SUMBERSUKO
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

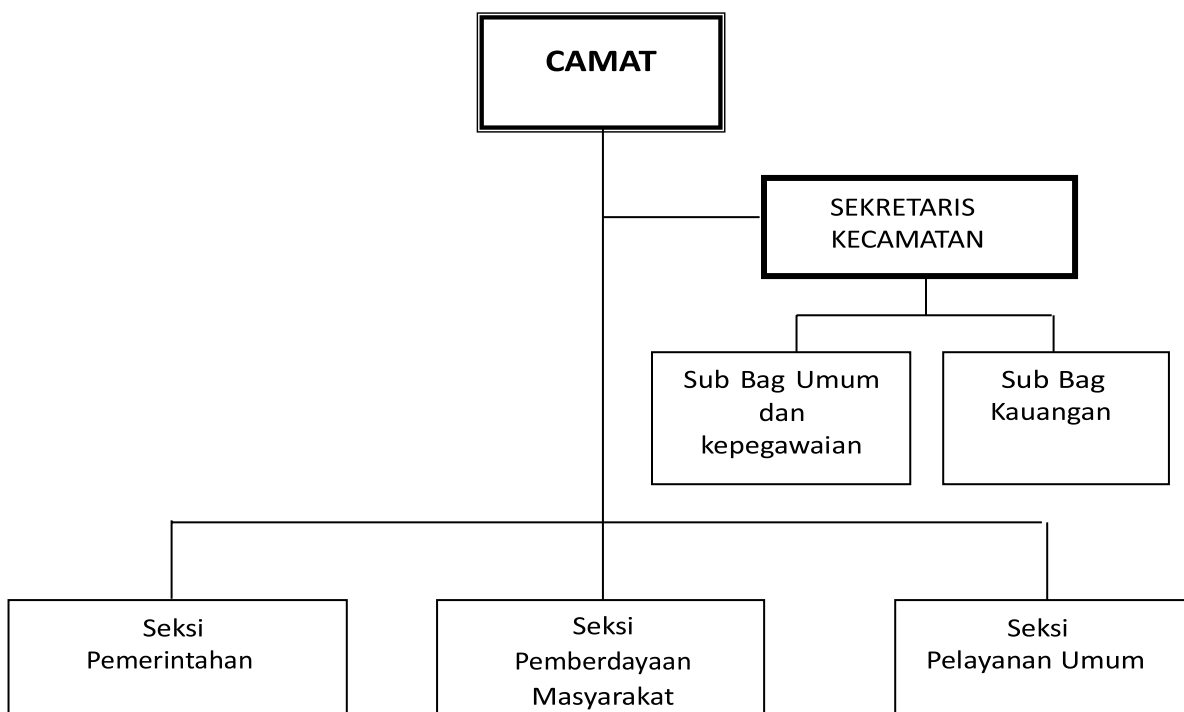
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Isu Strategi	4
Bab II Perencanaan Kinerja	5
2.1 Tujuan OPD	5
2.2 Perjanjian Kinerja	5
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2 Realisasi Anggaran	20
3.3 Capaian Kinerja Lainnya	25
Bab IV Penutup	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Strategi Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun Selanjutnya	27
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sumpoko dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan memiliki struktur sebagaimana berikut:



Rincian tugas pokok Camat adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/ Kelurahan di wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Jumlah sumberdaya di Kecamatan Summersuko sebanyak 22 orang dengan detail sebagaimana tabel berikut:

No	Nama	L/P	Pangkat/Gol	Status Kepegawaian	Esselon	Pendidikan
1	Adma Teguh Pambudi, S.STP	L	III/d Penata Tk I	PNS	III.a	D-IV
2	Abdul Hafidh Fuadi, S. H., MM	L	IV/a Pembina	PNS	III.b	S-2
3	Yos Sudaryono, S. Pd	L	III/d Penata Tk I	PNS	IV.a	S-1
4	Yudi Pradonggo	L	III/d Penata Tk I	PNS	IV.a	SLTA
5	Abdul Majid, S. AP	L	III/c Penata	PNS	IV.a	S-1
6	Mokhammad Saleh	L	III/a Penata Muda	PNS	IV.b	PAKET C
7	Rodiyati Listiyoriini, SE	P	III/a Penata Muda	PNS	IV.b	S-1
8	Mukhammad Ikhsan Aris	L	II/d Pengatur Tk. I	PNS	-	SLTA
9	Sugito	L	III/a Penata Muda	PNS	-	SLTA
10	Vendix Million Tandi Lomato	L	II/c Pengatur	PNS	-	SLTA
11	Satuni	P	II/d Pengatur Tk. I	PNS	-	SLTA
12	Mohamad Nur Kholiq	L	II/d Pengatur Tk. I	PNS	-	SLTA
13	Supriyadi	L	III/a Penata Muda	PNS	-	SLTA
14	Andreas Sarwono	L	II/c Pengatur	PNS	-	SLTA
15	Endrik Cahyono	L	-	Non ASN	-	PAKET C

16	Anwar Nuris	L	-	Non ASN	-	SLTA
17	Maya Windhi Anggarwati	P	-	Non ASN	-	S-1
18	Achmad Aricha Fitrianto	I	-	Non ASN	-	S-1
19	Muhammad Firmansyah	L	-	Non ASN	-	SLTA
20	Agung Solekhan Dwi Cahyono	L	-	Non ASN	-	SLTA
21	Galuh Firman Febrianto	L	-	Non ASN	-	SLTA
22	Sukamto	L	-	Non ASN	-	SLTA

Sedangkan untuk asset di Kecamatan Sumpoko sebagai berikut:

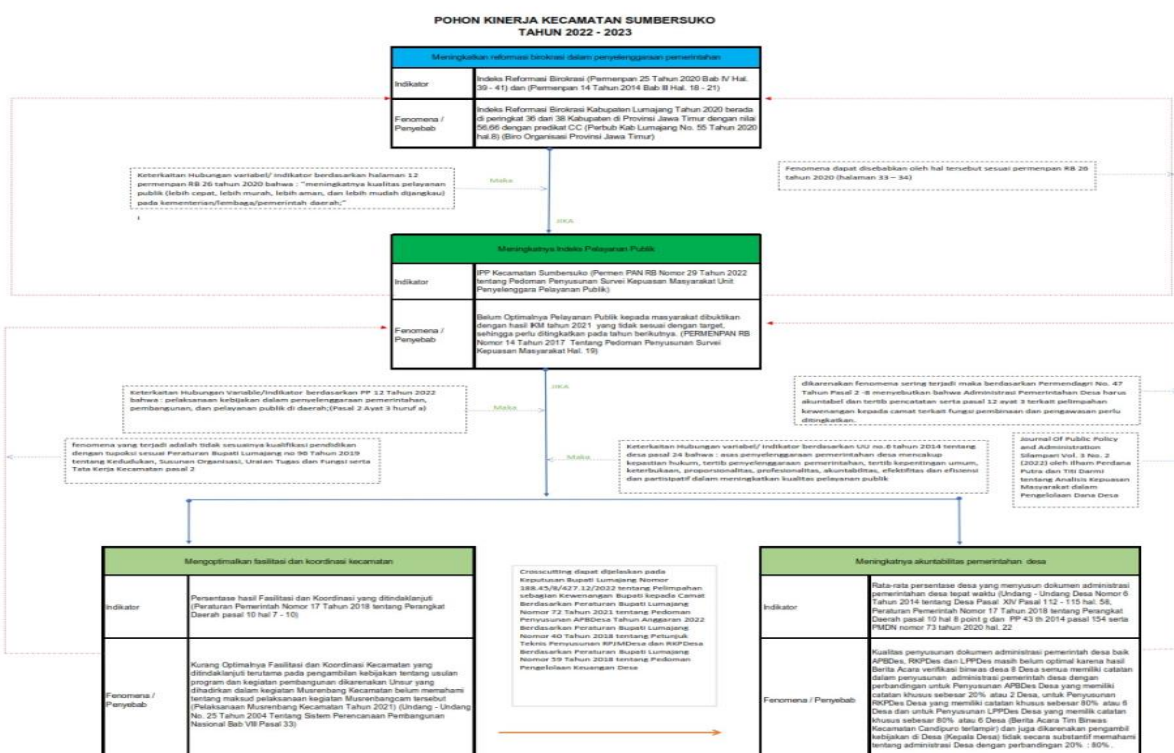
No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5
1	1.3.1	GOLONGAN TANAH	1	Bidang
2	1.3.1.01.	TANAH	1	Bidang
3	1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	140	Buah / Set
4	1.3.2.01.	ALAT BESAR	1	Buah / Set
5	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	8	Buah
6	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	Buah
7	1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set
8	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	97	Buah
9	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2	Buah
10	1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	Buah
11	1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	-	Buah
12	1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	-	Buah
13	1.3.2.10.	KOMPUTER	32	Buah
14	1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	-	Buah
15	1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	-	Buah
16	1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	Buah
17	1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	Buah
18	1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	Buah
19	1.3.2.16.	ALAT PERAGA	-	Buah
20	1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	Buah
21	1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	-	Buah
22	1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	-	Buah
23	1.3.3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4	Buah
24	1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	4	Buah
25	1.3.3.02.	MONUMEN	-	Buah
26	1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	-	Buah
27	1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	Buah
28	1.3.4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	-	Buah
29	1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	-	Buah
30	1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	-	Buah
31	1.3.4.03.	INSTALASI	-	Buah
32	1.3.4.04.	JARINGAN	-	Buah
33	1.3.5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	-	Buah / Set
34	1.3.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	Buah / Set

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan
35	1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	Buah / Set
36	1.3.5.03.	HEWAN	-	Ekor / Buah
37	1.3.5.04.	BIOTA PERAIRAN	-	Buah
38	1.3.5.05.	TANAMAN	-	Buah
39	1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	Buah
40	1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	Buah
41	1.3.6	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	Buah
42	1.3.6.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	Buah
TOTAL			145	

1.2 Isu Strategis

Masalah umum yang dihadapi oleh Kecamatan Summersuko adalah belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan akar masalah belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta kurangnya pengembangan kompetensi aparatur. Sedangkan isu strategis Kecamatan Summersuko terdiri dari:

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan Summersuko terhadap kinerja Pemerintahan Desa belum dilaksanakan secara berkesinambungan, hal ini dikarenakan terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Summersuko;
2. Belum optimalnya Kecamatan Summersuko dalam pemanfaatan media social untuk melakukan sosialisasi dan publikasi baik yang berkaitan dengan pelayanan adminitratif maupun pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Summersuko yang berkaitan dengan Masyarakat;
3. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mendukung program Pemerintah karena belum terfasilitasi secara maksimal;
4. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang tidak ideal dalam pelaksanaan pelayanan Pemerintahan (kondisi Gedung dan peralatan teknologi informasi yang membutuhkan peremajaan)



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan OPD

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sumpoko, Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpoko adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator tujuan Nilai IKM Kecamatan Sumpoko. Target yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu 83 angka, Survei dilakukan secara periodik setiap 3 bulan yang dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi internal terhadap layanan yang diberikan. Adapun kecamatan hanya mengirimkan nama-nama responden kepada bagian organisasi guna dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sumpoko, gambaran target tujuan dan indikator tujuan Kecamatan Sumpoko tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan	Indikator tujuan	Formulasi	Target Kinerja Tahun 2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Sumpoko	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Camat memiliki Perjanjian Kinerja dengan Bupati Lumajang sebagai komitmen Kinerja penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sumpoko Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Camat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada masa Bupati Lumajang yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023 dan pada masa pergantian Bupati dikarenakan habisnya masa jabatan dimana dijabat Oleh Pj. Bupati Lumajang pada tanggal 02 Oktober 2023. Perjanjian kinerja tersaji pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (setelah perubahan)	Target (sebelum Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	100%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (setelah perubahan)	Target (sebelum perubahan)
1	Terlaksananya Pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100 %	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	100%
3	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	100%
4	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100%
6	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100 %	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %	100%

No	Program		Anggaran (setelah perubahan)	Anggaran (sebelum perubahan)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	1.926.273.612	1.905.324.923
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	9.224.750	9.224.750
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	87.687.000	168.105.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	8.000.000	8.000.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	2.400.000	2.400.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	211.200.000	209.400.000
	Jumlah	Rp	2.244.785.362	2.302.454.672

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja sasaran merupakan Tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran Tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Tabel. Capaian Indikator Tujuan Kecamatan Sumbersuko Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Sumbersuko	85,50	85,05

Tabel, Capaian Indikator Sasaran Berdasarkan IKU
Kecamatan Sumbersuko Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	82.30%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%

Tabel, Capaian Indikator Program Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%
3	Terlaksananya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%
4	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%
6	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%	100%

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk mengetahui perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023, perlu dilakukan perhitungan Indikator Kinerja dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil dari perhitungan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indicator Kinerja Tujuan Kecamatan Summersuko Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Pasrujambe	85.50	85.05	99,47%

Dari tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Summersuko adalah senilai 99,47%

Tabel Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indicator Kinerja Sasaran Dan Program Kecamatan Summersuko Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	82.30%	100%	121.50%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Kecamatan sesuai SP dan SOP	Kecamatan sesuai SP dan SOP			
5	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Beberapa Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan 5 (lima) tahun sebelumnya perlu adanya perhitungan Indikator Kinerja dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Peningkatan / Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n-1)}{\text{Realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan perbandingan indicator tujuan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja 5 (tahun) sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel, Perbandingan antara realisasi kinerja Tujuan tahun 2023 dengan realisasi kinerja tujuan tahun sebelumnya (5 tahun) Indikator kinerja tujuan Kecamatan Sumbersuko

Tujuan	Indikator	Target					Realisasi					Peningkatan / Penurunan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Pasrujambe	n/a	85,12	85,30	85,40	85,50	n/a	85,13	84,03	82,43	85,05	n/a	n/a	-1.29%	-1.90*	3.17%

Data pada tabel diatas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan / Penurunan tahun 2021} = \frac{(84,03-85,13)}{85,13} \times 100\% = -1.29\%$$

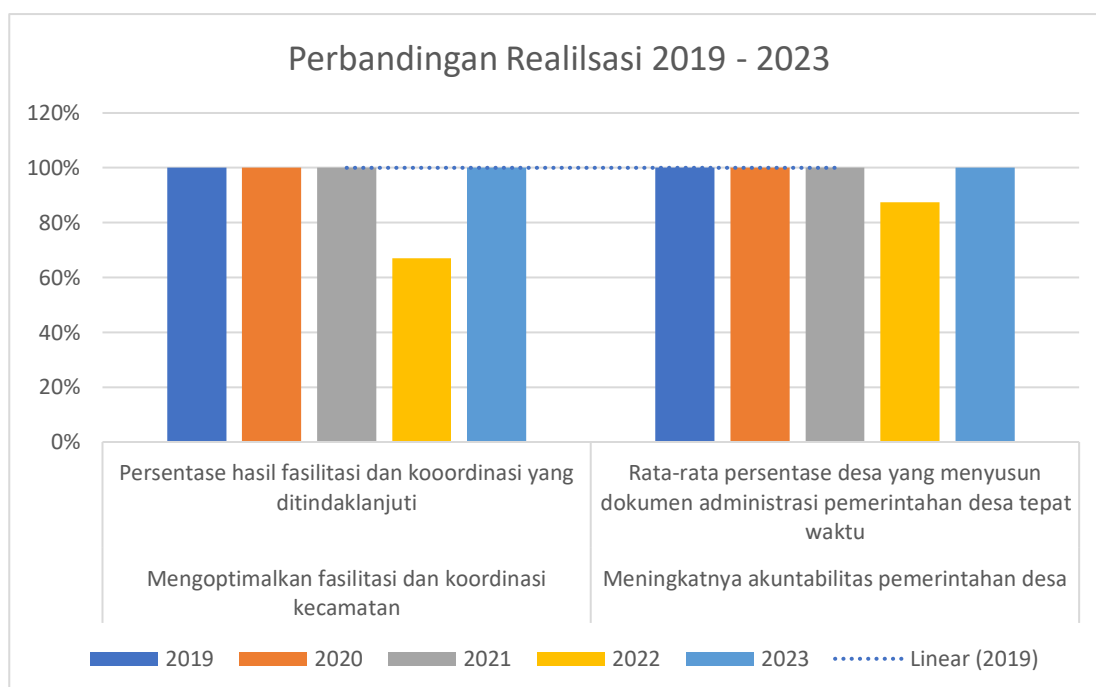
$$\text{Peningkatan / Penurunan tahun 2022} = \frac{(82,43-84,03)}{84,03} \times 100\% = -1.90\%$$

$$\text{Peningkatan / Penurunan tahun 2023} = \frac{(85,05-82,43)}{82,43} \times 100\% = 3.17\%$$

Dari Hasil perhitungan diatas, pada tahun 2021 IKM Kecamatan mengalami penurunan sebesar -1.29% dan tahun 2022 penurunan sebesar -1.90% , namun pada tahun 2023 IKM Kecamatan mengalami peningkatan sebesar 3.17%

Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	67%	100%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	87,5%	100%



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Tahun 2019 hingga 2021 tidak ada penurunan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan baik di sasaran mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan maupun di sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa. Sasaran mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan disebabkan oleh beberapa fasilitasi yang tidak terlaksana, diantaranya fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa, Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes, Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes, Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa,

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes, Fasilitasi pembinaan administrasi umum Pemerintahan Desa, Sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa, Pembinaan dan pengawasan Tupoksi BPD, Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan penyusunan perubahan RKPDes, Pembinaan dan pengawasan tupoksi LPMD, Fasilitasi penyusunan perubahan RPJMDes yang partisipatif, Pembinaan BKAD, Sosialisai pertahanan (data batas desa), Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat desa dalam perubahan RPJMDesa, Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyusunan perubahan RKPDes, Koordinasi pendampingan desa,

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa disebabkan adanya sebagian Desa Menyusun LPPDesa tidak tepat waktu.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berkenaan Dengan Target Renstra OPD

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD Kecamatan Sumbersuko perlu dilakukan perhitungan Indikator Kinerja dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target akhir pada Renstra}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD Kecamatan Sumbersuko dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel, Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD Kecamatan Sumbersuko Indikator kinerja tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra PD	Realisasi Tahun 2023	Capaian Indikator Kinerja
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Sumbersuko	85.50	85.05	99,47%

Tabel, realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD Kecamatan Summersuko Indikator kinerja Sasaran dan Program Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	82.30%	100%	121.50%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%
5	Terlaksananya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar perlu dilakukan perhitungan Indikator Kinerja dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut;

$$\text{Peningkatan / Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n-1)}{\text{Realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel realisasi kinerja tahun 2023 Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Summersuko

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Summersuko	99,47%

Tabel realisasi kinerja tahun 2023 tahun 2023 Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	IKM Pelayanan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar	109,59%

Sumber: <https://langensarikecamatan.banjarkota.go.id/wp-content/uploads/2024/01/LKIP-Kecamatan-Langensari-Tahun-2023.pdf>

Dari tabel diatas diperoleh dapat diperoleh perhitungan sebagaimana berikut:

$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(99,47\% - 109,59\%)}{109,59\%} \times 100\% = -9.23\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Summersuko masih jauh capaiannya dibandingkan dengan Kecamatan Langensari Kabupaten Banjar.

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan per Indikator Kinerja Yang Berkaitan Langsung Dengan Indikator Kinerja

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan per indicator kinerja yang berkaitan langsung dengan indicator kinerja Kecamatan Summersuko yaitu pada indicator tujuan dan sasaran. Keberhasilan/kegagalan dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Penyebab keberhasilan/kegagalan indicator tujuan Kecamatan

Sumbersuko (IKM Pelayanan Kecamatan Summersuko)

- Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Indikator Tujuan
 1. Tersedianya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan
 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
 4. Tersedianya system informasi pelayanan public pendukung operasional pelayanan (website, medsos)
 5. Tersedianya sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara online maupun offline
 6. Tersedianya inovasi pelayanan public (Tunas Pete) yang mendukung keberlanjutan pelayanan di Masyarakat
- Faktor yang mempengaruhi Kegagalan Indikator Tujuan
 1. Kualitas dan kuantitas ruang pelayanan tentang sarana dan prasaranya rusak (AC)
 2. Halaman parkir pemohon layanan tidak ada peneduh
 3. Alat perekaman KTP rusak
- b. Penyebab keberhasilan/kegagalan indicator Sasaran Kecamatan Summersuko
 1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
 1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar Aparatur Kecamatan;
 2. Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Desa dan Lintas Sektor;
 3. Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal dan dilakukan pengendalian oleh instansi terkait;
 4. Dilakukan pengendalian oleh pimpinan secara berkala (Tribulan).
 - Faktor yang mempengaruhi kegagalan
 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai;
 2. Sumber daya manusia yang kurang sehingga pelaporan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Belum sepenuhnya terdokumentasi pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan oleh kasi dan kasubbbag
 2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Desa
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
 1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Desa
 2. Sinergitas tenaga pendamping desa dan tim pendamping PLD

dengan tim binwas kecamatan

- Faktor yang mempengaruhi kegagalan

1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum Optimal

3.1.6. Upaya Peningkatan/Solusi Alternatif yang telah dilakukan

Upaya peningkatan/solusi alternatif yang telah dilakukan oleh Kecamatan Summersuko dalam menyelesaikan hambatan yang mempengaruhi kinerja diantaranya:

1. Melakukan inventarisasi untuk selanjutnya mencantumkan kebutuhan tersebut di dalam dokumen perencanaan guna pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
2. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada;
3. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan membagi habis tugas;
4. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala;
5. Memberikan arahan secara rutin dalam kegiatan fasilitasi terkait kelengkapan bukti pendukung;
6. Melakukan inovasi internal berupa rapat staf rutin dalam rangka meningkatkan pemahaman personil terhadap tugas dan fungsi masing-masing;
7. Memberlakukan pemberian *reward and punishment* secara proporsional terhadap kinerja pegawai guna meningkatkan kedisiplinan;
8. Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebelum batas akhir penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa

3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui persentase efisiensi sumber daya biaya perlu dilakukan Analisa efisiensi sumber daya biaya dengan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Persentase efisiensi sumber daya dikaitakan dengan capaian kinerja} = \frac{\text{capaian kinerja} - \text{persentase capaian realisasi anggaran (yang digunakan untuk mencapai IK tersebut)}}{\text{capaian kinerja}}$$

Hasil analisis efisiensi sumber daya biaya Kecamatan Summersuko dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel persentase efisiensi sumber dana biaya Tahun 2023
Kecamatan Summersuko

No	Program	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi	100%	94%	-6%

No	Program	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	efisiensi
		Kebutuhan Operasional Perkantoran			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	100%	100%	-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	-

Data diatas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

1. Efisiensi = $94\% - 100\% = -6\%$
2. Efisiensi = $100\% - 100\% = 0\%$
3. Efisiensi = $100\% - 100\% = 0\%$
4. Efisiensi = $100\% - 100\% = 0\%$
5. Efisiensi = $100\% - 100\% = 0\%$
6. Efisiensi = $100\% - 100\% = 0\%$

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam menentukan program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program	Indikator	Capaian Kinerja	Keterangan	
				Mendukung secara Langsung	Mendukung secara Tidak Langsung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	✓	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	✓	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	✓	
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	✓	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	✓	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	✓	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	✓	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	✓	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa keenam program menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahun anggaran 2023.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Summersuko disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
			Rp	Rp
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan		2,033,585,362	1,926,247,800
1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1,926,273,612	1,818,944,050
1.1.1		Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,612,000	13,612,000
1.1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,816,000	5,816,000
1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,148,000	2,148,000
1.1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,148,000	2,148,000
1.1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000	2,500,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi
1	2	3	4 Rp	5 Rp
1.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,535,306,445	1,445,334,894
1.1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,499,443,695	1,410,086,144
1.1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27,612,000	27,034,000
1.1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,000,000	2,000,000
1.1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,703,750	1,703,750
1.1.2.5		Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1,000,000	1,000,000
1.1.2.6		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	3,547,000	3,511,000
1.1.3		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	5,914,000	5,830,000
1.1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,694,000	2,654,000
1.1.3.2		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,776,000	1,748,000
1.1.3.3		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,444,000	1,428,000
1.1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14,750,000	14,749,200
1.1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14,750,000	14,749,200
1.1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62,993,196	62,970,924
1.1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,427,013	4,427,013
1.1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,409,451	28,397,179

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
			Rp	Rp
1.1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,776,732	6,776,732
1.1.5.4		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,300,000	6,300,000
1.1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,080,000	17,070,000
1.1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228,263,996	211,314,557
1.1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525,500	525,500
1.1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,030,096	25,108,775
1.1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,708,400	185,680,282
1.1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,433,975	65,132,475
1.1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21,209,300	21,057,800
1.1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,000,000	18,850,000
1.1.7.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,224,675	25,224,675
1.2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,224,750	9,224,750
1.2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,074,750	6,074,750
1.2.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,074,750	6,074,750
1.2.2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3,150,000	3,150,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi
1	2	3	4 Rp	5 Rp
1.2.2.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3,150,000	3,150,000
1.3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,687,000	87,679,000
1.3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73,152,000	73,144,000
1.3.1.1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,600,000	1,600,000
1.3.1.2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71,552,000	71,544,000
1.3.2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14,535,000	14,535,000
1.3.2.1		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6,060,000	6,060,000
1.3.2.2		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8,475,000	8,475,000
1.4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,000,000	8,000,000
1.4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8,000,000	8,000,000
1.4.1.1		Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	8,000,000	8,000,000
1.5		PROGRAM PENYELENGGARAAN	2,400,000	2,400,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
			Rp	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1.5.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,400,000	2,400,000
1.5.1.1		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,400,000	2,400,000
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		211,200,000	211,175,000
2.1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	211,200,000	211,175,000
2.1.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	211,200,000	211,175,000
2.1.1.1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,400,000	2,400,000
2.1.1.2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	202,400,000	202,400,000
2.1.1.3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,600,000	1,575,000
2.1.1.4		Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1,600,000	1,600,000
2.1.1.5		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	1,600,000	1,600,000
2.1.1.6		Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayan kecamatan	1,600,000	1,600,000

3.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Untuk mencapai seluruh program, perlu adanya inovasi yang memperlancar seluruh program agar mencapai target. Inovasi di Kecamatan Sumbersuko terdiri dari:

1. **Inovasi Tunas Pete** (Tuntas Pelayanan Akte Kelahiran, Akte Kematian dan E-KTP)

Tunas Pete merupakan suatu inovasi yang muncul karena adanya permasalahan yang timbul di dalam Masyarakat, karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya administrasi kependudukan Akte Kelahiran dan KTP yang harus dimiliki setiap penduduk yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah Kecamatan Sumbersuko. Tunas Pete hadir untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan pemahaman agar mau untuk melengkapi administrasi kependudukannya sendiri atau anggota keluarganya. “Tunas Pete” tampil dengan pelayanan prima yang akan memanjakan masyarakat kecamatan sumbersuko kabupaten lumajang, karena “Tunas Pete” akan menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan cukup di Desa dan akan di antar sampai rumah pemohon / masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang seharusnya dimiliki setiap warga negara Indonesia khususnya warga Kecamatan Sumbersuko. Tanpa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, karena kepengurusan administrasi kependudukan cukup di Desa dan akan diantar sampai depan rumah pemohon/masyarakat. Inovasi ini berjalan terhitung dari 22 Oktober 2019.

2. **Inovasi *Breakvast*** (Briefing aktifitas, atur seluruh capaian target kinerja)

inovasi ini muncul dikarenakan selama ini banyak terjadi keterlambatan capaian target dan tidak terdokumentasikannya kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan dalam bentuk *briefing* rutin bulanan guna pemaparan oleh para pejabat struktural terkait target apa yang harus dituntaskan dalam bulan berkenaan sekaligus melakukan evaluasi atas apa yang telah dituntaskan pada bulan sebelumnya. Pemaparan juga disertai dengan tampilan papan data yang senantiasa terpampang di ruang kerja untuk dipantau setiap saat (berisi target kinerja tahunan dan bulanan serta kondisi terbaru di wilayah). Inovasi ini berjalan terhitung dari 1 September 2023.

3. **Inovasi Jarkoni** (Jagong rembug karo omong kondisi terkini)

Inovasi ini berjalan terhitung 1 Agustus 2023, dilatarbelakangi oleh komunikasi pekerjaan yang kurang optimal dengan 8 desa yang ada di Kec. Sumbersuko dianggap perlu dilakukan komunikasi intens dengan para Kepala Desa. Adapun bentuk Jarkoni ini sendiri berupa rapat rutin setiap awal bulan dengan Kepala Desa dan Forkopimca guna membahas perkembangan Pembangunan

dan pemberdayaan di Desa, dan yang kedua berupa kumpul rutin non formal untuk meningkatkan kedekatan emosional, sehingga pelaksanaan Binwas dengan Desa dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat secara optimal mengena pada substansi. Beberapa hal yang sudah dicapai dari inovasi ini diantaranya : Perdes RPKDes (September 2023) dan Perdes APBDes (Desember 2023) tersusun tepat waktu secara serentak pada 8 Desa.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Sumbersuko disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Laporan ini meliputi tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, hambatan dan kendala, serta permasalahan yang dihadapi maupun pemecahannya. Laporan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sumbersuko.

4.1 KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari pengukuran sasaran kinerja tahun 2023 Kecamatan Sumbersuko dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran dapat terlaksana dengan baik (secara umum 100% dengan efisiensi 5,28%).

Walaupun secara umum kendala dalam capaian kinerja dimaksud tidak ada yang signifikan, namun beberapa kebutuhan sarana prasana menjadi tantangan tersendiri yang harus disiasati sembari menunggu proses pengadaan sarana prasana di tahun berikutnya.


4.2 STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN DI TAHUN SELANJUTNYA

Strategi yang akan dilakukan ditahun selanjutnya diantaranya sebagai berikut :

- a. Mempertahankan capaian program yang telah dicapai di tahun ini (dengan cara?)
- b. Melakukan inventarisasi dan pengusulan ulang kebutuhan sarana prasarana penunjang dalam dokumen perencanaan
- c. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penciptaan budaya kerja yang akuntabel
- d. Meningkatkan peran Binwas dan Fasilitas Kecamatan guna mendorong peningkatan pelayanan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

Demikianlah laporan kinerja Pemerintah Kecamatan Sumbersuko tahun 2023 disusun, laporan ini dibuat dengan harapan adanya perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sumbersuko.

Sumbersuko, 30 Desember 2023
CAMBUPATI SUMBERSUKO



ADMAN GUNGUH PAMBUDI, S.STP
NIP. 19920131 201406 1 001

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARI SUJATMIKO, SE
Jabatan : Camat Sumbersuko

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML
Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 10 Januari 2023
Pihak Pertama,


HARI SUJATMIKO, SE
NIP. 19650624 198803 1 009


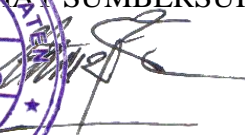
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUMBERSUKO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100 %
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %
3	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
4	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
6	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 1.905.324.922	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.224.750	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 168.105.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.000.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 209.400.000	DAU
	Jumlah	Rp 2.302.454.672	DAU


 BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 10 Januari 2023
 CAMAT SUMBERSUKO


HABI SUJATMIKO, SE
 NIP. 19650624 198803 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP
Jabatan : Camat Sumbersuko

Selanjutnya disebut pihak pertama

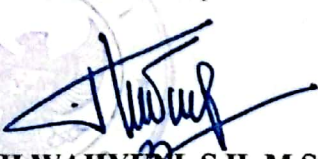
Nama : INDAH WAHYUNI, S.H. M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H. M.Si


Pihak Pertama,

ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP
NIP. 19920131 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUMBERSUKO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100 %
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %
3	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
4	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
6	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 1.926.273.612	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.224.750	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 87.687.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.000.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 211.200.000	DAU
	Jumlah	Rp 2.244.785.362	DAU


INDAH WAHYUNI, S.H. M.Si

Lumajang, 02 Oktober 2023
CAMAT SUMBERSUKO

ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP
 NIP. 19920131 201406 1 001

**LAPORAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN
2023 (E-81)**

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
Rencana Perangkat Daerah Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan: Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah
a. Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
b. Target Kinerja : 85,50 %
c. Realisasi Kinerja : 83,6 %

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Periode Akhir P-Rencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Kendala/permasalahan yang menghambat Capaian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah						
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					K		Rp			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22	23	24		
	Mengoptimalkan fasilitas dan koordinasi kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang diindikasikan	(Jumlah Hasil Fasilitasi dan koordinasi yang diindikasikan / Jumlah Fasilitas dan Koordinasi) x 100%	82,30	4.830.773,966	100	791.700,488	###	2.033.585,362	19	367.033,148	19	623.421,718	25	426.389,129	36	509.403,805	100	1.926.247,600	100	2.859.202,730	1,22				KECAMATAN SUMBERSUKO						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	(Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi / Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan) x 100%	100	4.736.048,868	100	776.050,488	100	1.926.273,612	19	335.368,148	19	609.209,718	25	407.532,129	37	446.784,055	100	1.819.944,050	100	2.736.246,980	1				SEKRETARIAT							
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terlaksana x 100	100		100		100	13.612,000	33	2.183,000	11	589,000	33	2.419,000	22	8.421,000	100	13.612,000	100	13.612,000	1	#DIV/0!										
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	2	dok	2	5.816,000	1	1.454,000	0		1	0	0	4.362,000	2	5.816,000	4	5.816,000	2	#DIV/0!										
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dok	1	dok	1	2.148,000	0		0	0	1	0	2.148,000	0	2.148,000	2	2.148,000	2	#DIV/0!											
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dok	1	dok	1	2.148,000	0		0	0	0	0	2.148,000	1	2.148,000	2	2.148,000	2	#DIV/0!											
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khas Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	lap	1	lap	1	1.000,000	1	729,000	0	0	0	0	271,000	0	1.000,000	2	1.000,000	2	#DIV/0!											
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	4	lap	4	lap	4	2.500,000	1	1	1	589,000	1	1	1.911,000	4	2.500,000	8	2.500,000	2	#DIV/0!											
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana x100	100		100	633.715,628	100	1.535.306,445	23	284.063,798	23	535.300,388	23	302.794,126	30	323.176,582	100	1.445.334,894	100	2.079.050,522	1	#DIV/0!										
7.01.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Ong/12 bh	12	Ong/12 bh	1.204,112,874	14	Ong/12 bh	1.499.443,695	14	Ong/3 bh	276.254,548	14	Ong/3 bh	525.617,138	14	Ong/12 bh	295.727,126	14	Ong/3 bh	312.487,332	14	Ong/12 bh	1.410.086,144	14	Ong/12 bh	2.614.199,018	1	#DIV/0!	adanya mutasi pegawai	melakukan rekonsiliasi ulang
7.01.01.2.02.02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	12	dok	27,612,000	12	dok	27,612,000	3	dok	6,903,000	3	dok	6,903,000	3	dok	6,325,000	3	dok	6,903,000	12	dok	27,034,000	24	dok	54,646,000	2	#DIV/0!		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana	4	dok	4	dok	2,000,000	1	dok	1	dok	1,914,000	1	dok	70,000	1	dok	16,000	4	dok	2,000,000	4	dok	2,000,000	8	dok	2,000,000	2	#DIV/0!			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	lap	1	lap	1.703,750	-	lap	-	lap	-	lap	-	1.703,750	1	lap	1.703,750	2	lap	1.703,750	2	#DIV/0!									
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian balasan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Balan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Balan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun	1	dok	1	lap	1.000,000	-	dok	-	dok	-	dok	672,000	1	dok	328,000	1	dok	1.000,000	2	dok	1.000,000	2	dok	1.000,000	2	#DIV/0!				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang terselesaikan	17	lap	17	lap	3.547,000	4	lap	906,250	4	lap	866,250	4	lap	1.738,500	17	lap	3.511,000	34	lap	3.511,000	2	#DIV/0!								
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana x100	100		100	5.914,000	19	360,000	25	1.142,000	31	2.372,000	25	1.956,000	100	5.830,000	100	5.830,000	1	#DIV/0!												
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2	dok	2	dok	2.694,000	-	dok	-	dok	-	1	dok	1.670,000	1	dok	984,000	2	dok	2.654,000	4	dok	2.654,000	2	#DIV/0!						
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	2	lap	2	lap	1.776,000	-	dok	-	1	dok	600,000	1	dok	652,000	0	dok	496,000	2	dok	1.748,000	4	dok	1.748,000	2	#DIV/0!					
7.01.01.2.03.06	Perawatan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perawatan barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan	Jumlah Laporan Perawatan barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan	12	lap	12	lap	1.444,000	3	bh	360,000	3	bh	542,000	3	bh	50,000	3	bh	478,000	12	bh	1.428,000	24	bh	1.428,000	2	#DIV/0!					
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana x100	-	%	0	%	14.750,000	0	%	0	%	14.749,200	0	%	14.749,200	0	%	14.749,200	100	%	14.749,200	#DIV/0!	#DIV/0!									
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	-	paket	0	paket	14.750,000	-	paket	-	paket	-	1	paket	14.749,200	0	paket	14.749,200	1	paket	14.749,200	1	paket	14.749,200	#DIV/0!	#DIV/0!						

7.01.03.2.06	Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	0 %	100 %	14.535.000	25 %	25 %	3.000.000	25 %	1.590.000	25 %	9.945.000	100 %	14.535.000	100 %	14.535.000	1	#DIV/0!									
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	96 kelurga	96 kelurga	48 kelurga	6.060.000	kelurga	kelurga	48 kelurga	765.000	kelurga	5.295.000	48 kelurga	6.060.000	144 kelurga	6.060.000	1,5	#DIV/0!										
7.01.03.2.06.12	Pembudayaan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Keluarga Berkualitas	102 kelurga	102 kelurga	48 kelurga	8.475.000	kelurga	24 kelurga	3.000.000	24 kelurga	825.000	kelurga	4.650.000	48 kelurga	8.475.000	150 kelurga	8.475.000	1.4705882	#DIV/0!									
7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETRERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Ketreraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketreraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan	100 %	10.000.000	100 %	8.000.000	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	1	1	KASI PEMERINTAHAN									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketreraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketreraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketreraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 fasilitasi	10.000.000	1	fasilitasi	1	fasilitasi	8.000.000	0	fasilitasi	0	fasilitasi	0	fasilitasi	1	fasilitasi	8.000.000	2	fasilitasi	8.000.000	1	0,8					
7.01.04.2.01.01	Sinergis dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergis dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergis dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	8 lap	10.000.000	8 lap	8.000.000	lap	lap	1 lap	8.000.000	1 lap	8.000.000	9 lap	8.000.000	1.125	80%												
7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 %	6.000.000	100 %	2.400.000	100 %	2.400.000	0 %	600.000	50 %	600.000	0 %	600.000	100 %	2.400.000	100 %	4.800.000	1	1	KASI PEMERINTAHAN							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1	fasilitasi	6.000.000	2	fasilitasi	2.400.000	2	fasilitasi	2.400.000	0	fasilitasi	600.000	1	fasilitasi	600.000	0	fasilitasi	600.000	1	fasilitasi	600.000	2	fasilitasi	4.800.000	4	0,7272727
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	2 dok	6.600.000	2 dok	2.400.000	2 dok	2.400.000	0 dok	600.000	1 dok	600.000	0 dok	600.000	1 dok	600.000	2 dok	2.400.000	4 dok	4.800.000	2	73%						
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) / (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100%	100 %	205.485.000	100 %	194.400.000	100 %	211.200.000	33,3 %	32.400.000	0,0 %	64.800.000	33,3 %	51.600.000	33,3 %	62.375.000	100 %	211.175.000	100 %	4.200.000	1	#DIV/0!	KECAMATAN SUMBERSUKO					
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100 %	87,5 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	4.200.000	1	#DIV/0!	KASI PEMERINTAHAN									
		Persentase Desa yang menetapkan APBDDesa Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100 %	97,684.000	87,5 %	194.400.000	100 %	211.200.000	0 %	32.400.000	0 %	64.800.000	0 %	51.600.000	100 %	62.375.000	100 %	211.175.000	100 %	4.200.000	1	#DIV/0!						
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDesa Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100 %	87,5 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	1												
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa Tepat Waktu	8 Desa	7 desa	8 desa	0 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	8 desa	4.200.000	1	#DIV/0!										
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDDesa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDDesa Tepat Waktu	8 Desa	7 desa	8 desa	0 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	0 desa	8 desa	8 desa	4.200.000	1	#DIV/0!										
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDesa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDesa Tepat Waktu	8 Desa	7 desa	8 desa	8 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 desa	8 desa	8 desa	1	#DIV/0!													
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyatuan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dok	0 dok	8 dok	2.400.000	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2.400.000	8 dok	2.400.000	8 dok	2.400.000	1	#DIV/0!										
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dok	8 dok	194.400.000	8 dok	202.400.000	2 dok	32.400.000	2 dok	64.800.000	2 dok	51.100.000	2 dok	54.100.000	8 dok	202.400.000	16 dok	396.800.000	2	#DIV/0!							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dok	0 dok	8 dok	1.600.000	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	500.000	2 dok	1.075.000	8 dok	1.575.000	8 dok	1.575.000	1	#DIV/0!									
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	8 dok	0 dok	8 dok	1.600.000	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	1	#DIV/0!											
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa	8 dok	0 dok	8 dok	1.600.000	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	1	#DIV/0!											
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	8 dok	0 dok	8 dok	1.600.000	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	8 dok	1.600.000	1	#DIV/0!											
							2.244.785.362	100 %									2.137.422.800												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
d.	Indikator Tujuan	: Adanya Sinergitas antara pimpinan dan semua unsur staf pada semua lembaga yang ada di wilayah kecamatan																											
e.	Indikator Sasaran	: Penyusunan Dokumen Perencanaan yang sesuai ketentuan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
f.	Indikator Tujuan	: Adanya kegiatan lain diluar program / kegiatan yang telah direncanakan yang harus dilaksanakan																											

g.	Indikator Sasaran : Ketersediaan Sumberdaya manusia yang kurang memadai dan mirimnya sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):	

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

PETUNJUK PENGISIAN :

a.	Diisi dengan indikator Tujuan Perangkat Daerah
b.	Diisi dengan target indikator tujuan perangkat Daerah Tahun berjalan
c.	Diisi dengan realisasi indikator tujuan Perangkat Daerah Tahun berjalan
d.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
e.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
f.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
g.	Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
Kolom 1	: diisi dengan nomor urut program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 2	: diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 3	: diisi dengan uraian program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pada matriks TC 27 P Renstra
Kolom 4	: diisi Jenis indikator kinerja program (outcome) kegiatan/sub kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum pada matriks TC 27 P Renstra
Kolom 5	: diisi Formulasi atau rumus perhitungan indikator Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom 6	: diisi jumlah-besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) yang tercantum dalam matriks TC 27 sampai dengan akhir periode P Renstra Perangkat Daerah
Kolom 7	: diisi jumlah-besaran realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2
Kolom 8	: diisi jumlah-besaran target kinerja (K) dan Jumlah anggaran (Rp) yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1) yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten
Kolom 9	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan I untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 10	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan II untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 11	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan III untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 12	: diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan IV untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 13	: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun berjalan (n-1)
Kolom 14	: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) P Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan
Kolom 15	: diisi dengan rasio antara realisasi dan target P Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
Kolom 16	: diisi dengan Kendala/Permasalahan yang menghambat Capaian Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom 17	: diisi dengan Ujaya mengatasi kendala/permasalahan Capaian Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom 18	: diisi nama Perangkat Daerah, Nama Bidang, Nama Seksi, Nama Bagian yang bertanggungjawab dan melaksanakan Renja Perangkat daerah yang devuasi

Disusun
Lumajang, tanggal 03 Januari 2024
Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Sumberseko
Kabupaten Lumajang

ADMA TEGUH PAMBUJI S.STP
NP. 19920131 201406 1 001

Devuasi
Lumajang, tanggal
Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang

(.....)

OUTLINE POHON KINERJA KECAMATAN SUMBERSUKO

POHON KINERJA KECAMATAN SUMBERSUKO TAHUN 2022 - 2023

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan 25 Tahun 2020 Bab IV Hal. 39 - 41) dan (Permenpan 14 Tahun 2014 Bab III Hal. 18 - 21)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 56,66 dengan predikat CC (Perub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8) (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan halaman 12 permenpan RB 26 tahun 2020 bahwa : "meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;"

Maka

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai permenpan RB 26 tahun 2020 (halaman 33 – 34)

JIKA

Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	
Indikator	IPP Kecamatan Sumbersuko (Permen PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil IKM tahun 2021 yang tidak sesuai dengan target, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya. (PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

Keterkaitan Hubungan Variable/Indikator berdasarkan PP 12 Tahun 2022 bahwa : pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)

Maka

dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

JIKA

fenomena yang terjadi adalah tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

Maka

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 bahwa : asas penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi

Journal Of Public Policy and Administration Silampari Vol. 3 No. 2 (2022) oleh Ilham Perdana Putra dan Titi Darmi

dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

tentang Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	
Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti terutama pada pengambilan kebijakan tentang usulan program dan kegiatan pembangunan dikarenakan unsur yang dihadirkan dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan belum memahami tentang maksud pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tersebut (Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021) (Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VIII Pasal 33)

Crosscutting dapat dijelaskan pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal XIV Pasal 112 - 115 hal. 58, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa baik APBDes, RKPDes dan LPPDes masih belum optimal karena hasil Berita Acara verifikasi binwas desa 8 Desa semua memiliki catatan dalam penyusunan administrasi pemerintah desa dengan perbandingan untuk Penyusunan APBDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 20% atau 2 Desa, untuk Penyusunan RKPDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 80% atau 6 Desa dan untuk Penyusunan LPPDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 80% atau 6 Desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Candipuro terlampir) dan juga dikarenakan pengambil kebijakan di Desa (Kepala Desa) tidak secara substantif memahami tentang administrasi Desa dengan perbandingan 20% : 80%.

DOKUMENTASI

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA



PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

